

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminrin Tatang M, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Burhanuddin, Dasar Kewenangan JPN Dalam Perkara Perdata Untuk Mewakili Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dan Problematikanya, (Surabaya: 2013)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, kamus lengkap bahasa Indonesia karangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Evy Ekawati, Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata, (Yogyakarta: Genta Press, 1995)
- H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1999)
- Jan Maringka, Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Kahmad, Dadang, Metode Penelitian Agama, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000).
- Lili Rasjidi dan L.B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999)
- Prof. Dr. Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung : Pustaka Setia, 2013)
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum. (Granit: Jakarta, 2000)
- RM Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia, 1998).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).

Tatang M. Aminrin, menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi. (Semarang: Universitas diponegoro, 2011)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-/A/JA/10/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

C. Jurnal atau Karya Ilmiah

Agus, K.L., Faisal, A.R., & Mahdi, S. Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala*, 1 (2), 164, 2017)

Kusumawati, Tiara. Tinjauan Yuridis Pembatasan Pemilikan Hak atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.868/I/A1975), (Semarang: *Skripsi Undip*, 2010).

Prasasi, Cindy Ayu. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Semarang: *Skripsi Undip*, 2016)

Riska Wijayanti. Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 8 (2)

D. Media Online

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses 30 Mei 2019

E. Wawancara

Bp. Hentoro Cahyono, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Bp. Yenni Mayasari, S.H., M.H selaku Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

